

## TINJAUAN PERKEMBANGAN EKONOMI

### **Bertahan di Tengah Gempuran Inflasi dan Ketidakpastian Subsidi BBM**

*Ira S. Titiheruw dan Haryo Aswicahyono*

#### PENGANTAR

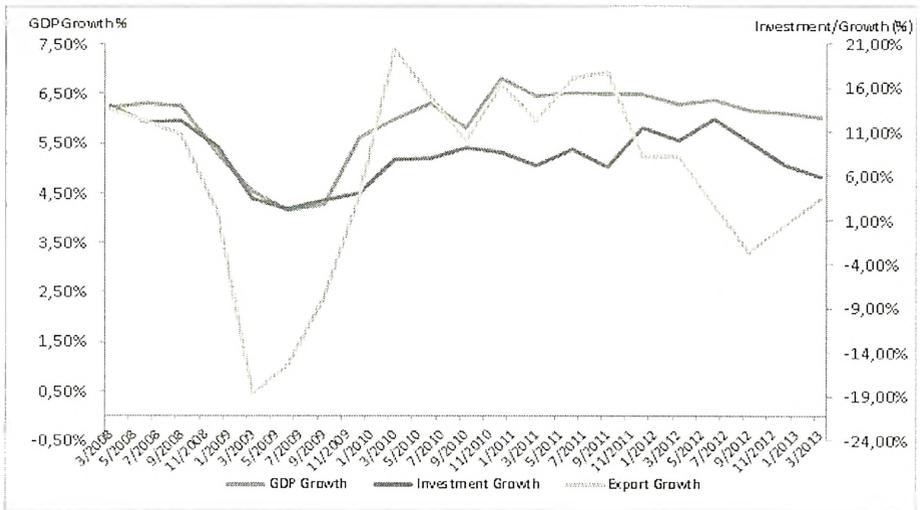
Dalam ringkasan eksekutif ini pertumbuhan PDB riil tercatat sebesar 6,02% (yoy) dalam kuartal I 2013—tingkat pertumbuhan terendah sejak kuartal III (September) 2010. Kinerja net ekspor terlihat membaik setelah terus menurun sejak pertengahan tahun 2012. Namun pertumbuhan investasi mulai turun, demikian pula dengan konsumsi rumah tangga (RT) yang mengalami sedikit perlambatan. Meskipun begitu, pertumbuhan konsumsi RT masih cukup tinggi sebagai faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi dalam kuartal I 2013. Jika dilihat dari sisi penawaran, seluruh sektor (kecuali sektor pertambangan) memperlihatkan kinerja yang konsisten, meskipun beberapa sektor terlihat melemah. Pada saat yang bersamaan, perekonomian Indonesia juga penuh dengan catatan merah terkait tekanan inflasi yang kuat selama kuartal I 2013 akibat tingginya harga bahan pangan dan akibat faktor musiman ditambah dengan kurangnya koordinasi pemerintah dalam menangani pasokan.

#### PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Indonesia tumbuh 6,02% dalam kuartal I 2013—sedikit lebih rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan dalam ku-

artal sebelumnya yang berakhir Desember 2012 (6,11% yoy). Konsumsi RT meningkat sebesar 5,17% (yoy)—turun dibandingkan pertumbuhannya pada kuartal yang lalu yang tercatat sebesar 5,36% yoy. Melambatnya pertumbuhan konsumsi RT, terutama disebabkan oleh tingginya tekanan inflasi dalam periode yang sama. Meskipun begitu, konsumsi RT tetap melaju—didorong oleh pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah seperti Bali, Jawa Tengah dan lainnya sehingga meskipun agak melemah, konsumsi RT masih merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi.

**Grafik 1. Pertumbuhan PDB Riil, Investasi dan Ekspor (% yoy), 2008-Q1 2013**

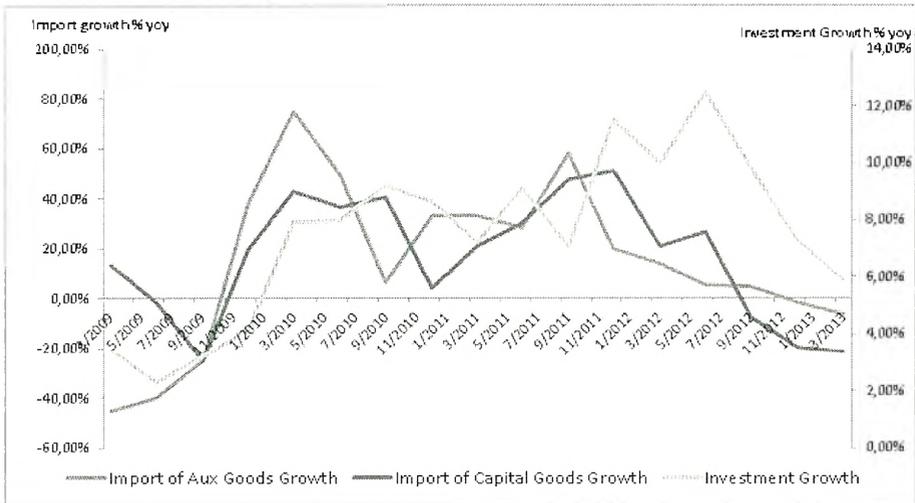


Sumber: CEIC, Statistics Indonesia

Selain konsumsi RT, Pilkada juga berpengaruh dalam pertumbuhan konsumsi pemerintah dalam kuartal I 2013. Tahun lalu, konsumsi pemerintah tercatat membukukan pertumbuhan negatif dalam dua kuartal terakhir tahun 2012 (-2,81% dalam Q3-2012 dan -3,34% dalam Q4-2012), akibat pembatasan penggunaan anggaran pemerintah karena adanya kekhawatiran defisit anggaran di tahun 2013. Dalam kuartal pertama 2013, pembelanjaan pemerintah tumbuh 0,42% yoy.

Dibandingkan tahun 2012, pertumbuhan investasi dalam kuartal I 2013 terlihat melemah. Tingkat pertumbuhan investasi mencapai 5,90% yoy—menurun dari 7,29% yoy dalam kuartal sebelumnya yang berakhir Desember 2012. Dengan estimasi waktu tunggu (*time lag*) sekitar enam sampai sembilan bulan sesudah impor barang modal, perlambatan investasi yang terjadi dalam bulan Januari-Maret 2013 sedikit lebih cepat dibandingkan ekspektasi BKPM. Sebagai catatan, impor barang modal sudah mulai menurun sejak kuartal ketiga 2012. Jika dilihat dari data impor barang modal dalam kuartal I 2013 yang terus menurun, pemerintah dan sektor swasta harus sudah mengantisipasi terjadinya penurunan investasi di akhir 2013.

**Grafik 2. Investasi, Impor Barang Modal dan Bahan Penolong, 2009-Q1 2013**



Sumber: CEIC, Statistics Indonesia

Laporan terakhir yang dikeluarkan BKPM menyebutkan dalam kuartal I 2013, investasi langsung meningkat 30,6% (yoy), dengan nilai nominal tumbuh dari IDR 71.2 triliun (dalam kuartal 12012) menjadi IDR 93.0 triliun (US \$9.58 miliar). Dari total realisasi investasi selama Januari-Maret 2013, 70% berasal dari investor asing senilai IDR 65.5 triliun) sedangkan 30% sisanya merupakan PMDN.

Negara-negara yang melakukan investasi terbesar dalam kuartal I 2013 adalah Jepang (USD \$1.2 miliar), Amerika Serikat (USD \$0.9 miliar), Korea Selatan (USD \$0.8 miliar), Singapura (USD \$0.6 miliar), dan Inggris (USD \$0.5 miliar). Mayoritas investor asing baru (64%) menanamkan modalnya dalam industri manufaktur, sementara 24% lainnya ke sektor primer (terutama sektor pertambangan) dan 11% sisanya mengalir ke sektor tersier. Lihat Tabel 1 untuk sektor-sektor yang menarik PMA terbesar dalam kuartal I 2013.

**Tabel 1. Sektor-sektor yang Terbanyak Menarik Investasi Asing di Indonesia (Q1-2013)**

Sektor	USD Milyar
Pertambangan	1.4
Industri Kimia dan Farmasi	1.2
Industri Logam, Mesin dan Elektronik	1.0
Industri Alat Transpor dan Lainnya	0.9
Industri Kertas dan Percetakan	0.6

Sumber: BKPM

Sementara itu, sekitar 40% modal domestik ditanamkan dalam industri manufaktur, terutama industri makanan dan industri Logam, Mesin dan Elektronik. Hanya 26% PMDN baru bergerak di sektor primer (terutama sektor pertambangan) dan sisanya—sekitar 33% mengalir ke sektor *non-tradable* seperti transportasi dan komunikasi serta Listrik, Gas dan Air. Tabel 2 menyajikan pembagian penanaman modal domestik yang lebih rinci di Indonesia untuk kuartal I 2013.

**Tabel 2. Sektor Penerima Investasi Domestik Terbesar di Indonesia (Q1-2013)**

Sektor	IDR triliun
Pertambangan	6.0
Transportasi, Pergudangan dan Telekomunikasi	6.0
Industri Makanan	4.0
Industri Logam, Mesin dan Elektronik	1.8
Listrik, Gas dan Air	1.7

Sumber: BKPM

Sebagaimana telah disebutkan, dari sisi penawaran, seluruh sektor menunjukkan pertumbuhan yang konsisten—kecuali untuk sektor pertambangan. Sektor Pertanian memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan sektor lain karena datangnya musim panen dalam kuartal I 2013. Tingkat pertumbuhan sektor pertanian meningkat dari 1,98% yoy pada kuartal 4 2012 menjadi 3,7% dalam kuartal I 2013. Industri manufaktur tumbuh 5,84% yoy, lebih rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan 6,24% yoy yang tercatat dalam kuartal sebelumnya. Sementara itu, dari semua subsektor tersier, subsektor transportasi dan komunikasi masih menunjukkan kinerja terbaiknya dengan pertumbuhan 9,98% yoy—meningkat sedikit karena pada kuartal 4 2012 hanya tumbuh 9,63% yoy. Meskipun demikian, subsektor tersier lainnya menunjukkan perlambatan—terutama subsektor konstruksi (dengan tingkat pertumbuhan yang melambat dari sebelumnya 7,8% menjadi 7,2% di Q1 2013 serta subsektor perdagangan, hotel & restoran (dari 7,8% turun menjadi 6,52%).

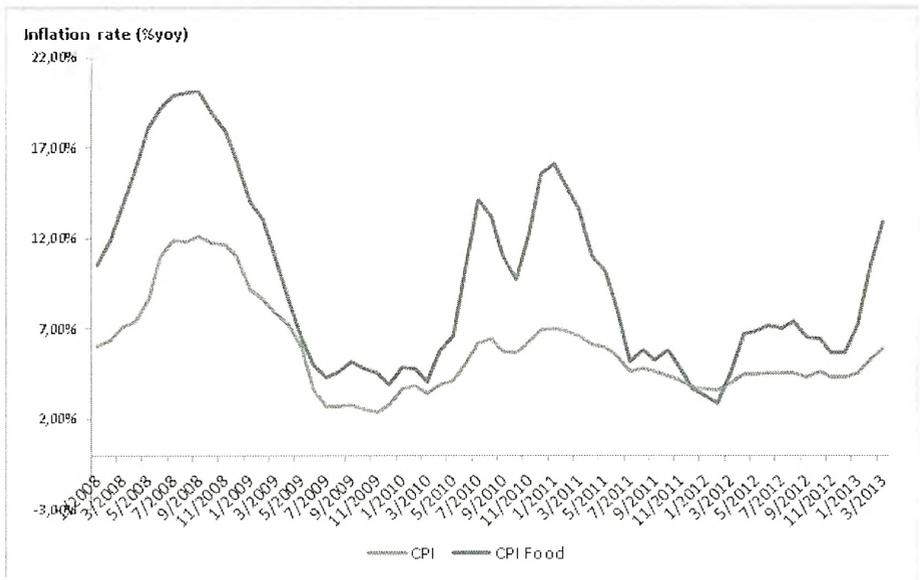
## TEKANAN INFLASI

Tekanan inflasi yang tinggi berlangsung terus menerus selama kuartal I 2013. Cuaca buruk menghambat distribusi pasokan bahan makanan, ditambah adanya pembatasan impor sayur dan buah-buahan yang ditetapkan pemerintah pada saat yang hampir bersamaan telah mengakibatkan terus meningkatnya harga bahan makanan. Faktor lain yang juga menambah tekanan inflasioner adalah terlambatnya musim panen tahun ini, serta tingginya harga daging sapi yang telah terjadi sebelumnya. Grafik 3 memperlihatkan pergerakan inflasi umum yang mengikuti pergerakan harga bahan makanan sejak tahun 2008.

Pada bulan Februari 2013, penyesuaian tarif listrik yang pertama di tahun 2013 (direncanakan secara rata-rata akan naik 15% di akhir tahun) turut menambah tekanan inflasi—meskipun penyesuaian pertama hanya rata-rata sebesar 4,3%. Terjadi kenaikan tingkat harga umum sebesar 0,75% dalam sebulan. Selain itu, faktor lain yang ikut menambah tekanan inflasi adalah peningkatan UMP yang berlaku awal tahun. Pada bulan Maret 2013, terbatasnya pasokan domestik dan kebijakan restriksi impor terhadap beberapa bahan makanan

seperti bawang putih dan bawang merah mengakibatkan tingginya kenaikan indeks harga bahan makanan melebihi normal (2,44% mom or 14,2% yoy).

**Grafik 3. Tingkat Inflasi (% yoy), 2008-Q1 2013**



Sumber: Statistics Indonesia

Dengan tingginya tingkat inflasi di kuartal I tahun 2013, Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat bunga sebesar 5,75% yang sudah berlaku sejak bulan Februari 2012 mengingat inflasi inti masih berkisar 4,5% yoy—masih dalam batas jangkauan inflasi Bank Indonesia. Perekonomian domestik pun masih memerlukan tingkat bunga rendah yang dapat terus mendukung ekspansi usaha. Namun demikian, dalam waktu dekat, Bank Indonesia akan terpaksa melakukan penyesuaian tingkat bunga karena pemerintah dan DPR hampir sepakat untuk mengurangi besarnya subsidi BBM dengan cara menaikkan tingkat harga bahan bakar.

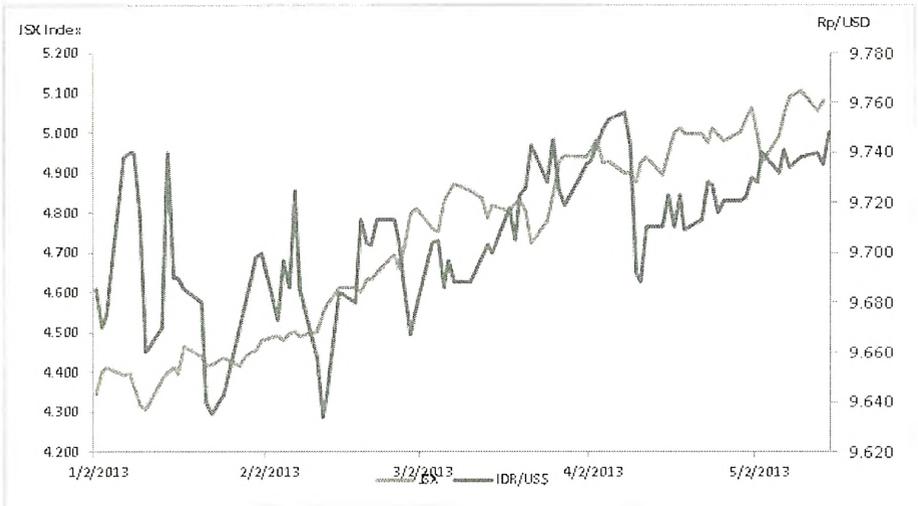
## NILAI TUKAR DAN PASAR MODAL

Selama kuartal I 2013, Rupiah mengalami tekanan depresiasi yang sangat kuat. Secara rata-rata, nilai Rupiah telah turun 0,7% (qoq)

dari IDR 9613/US\$ menjadi IDR 9680/US\$. Beberapa menyebutkan depresiasi Rupiah merupakan anomali karena pada saat yang bersamaan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 4940 sebelum ditutup akhir Maret 2013. Laporan Neraca Pembayaran terbaru yang dikeluarkan bulan Mei 2013 menyebutkan bahwa aliran modal asing yang masuk ke pasar saham dalam kuartal I 2013 tercatat senilai US\$ 2.6 miliar (meningkat dari US\$ 0.6 miliar pada akhir Desember 2012 yang lalu). Selain itu, investor asing juga tercatat sebagai pembeli bersih (*net buyer*) Surat Utang Negara berdenominasi rupiah sebesar USD 1.0 miliar. Data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan pada akhir Maret 2013 memperlihatkan investor asing masih memegang 32.5% total Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan (turun sedikit dari posisi pemegang 32.9% dari total SUN pada akhir kuartal sebelumnya yang berakhir Desember 2012).

Namun, dengan memperhatikan lebih rinci lagi defisit neraca transaksi berjalan yang sudah terjadi sejak kuartal 4 2011, depresiasi Rupiah nampaknya tidak terlalu mengherankan. Sumber defisit neraca transaksi berjalan berasal dari dua hal, yakni (1) meningkatnya impor BBM, baik dari segi volume maupun harganya di pasar internasional dan (2) menurunnya kinerja ekspor non-migas—karena turunnya harga beberapa komoditi ekspor seperti batubara dan kelapa sawit. Selama bulan Januari-Maret 2013, neraca transaksi berjalan mencatat defisit yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya karena total impor menurun secara keseluruhan, baik impor barang konsumsi, bahan penolong maupun barang modal karena turunnya kegiatan konsumsi dan investasi—lihat bagian Pertumbuhan Ekonomi di atas.

### Grafik 4. IHSG dan Nilai Tukar IDR/US\$, Januari-Maret 2013



Sumber: CEIC

Meningkatnya tekanan depresiasi juga disebabkan oleh kuatnya tekanan inflasioner—lihat ulasan mengenai inflasi. Hal yang juga membuat tekanan inflasi meningkat adalah ketidakpastian yang tercipta oleh pemerintah menyangkut pengurangan subsidi BBM dengan menaikkan harga bahan bakar premium dan solar. Diskusi dan perdebatan mengenai hal ini telah berlangsung sejak awal tahun. Ketidakpastian ini turut membuat nilai Rupiah terdepresiasi.

#### PENGURANGAN SUBSIDI BBM 2013

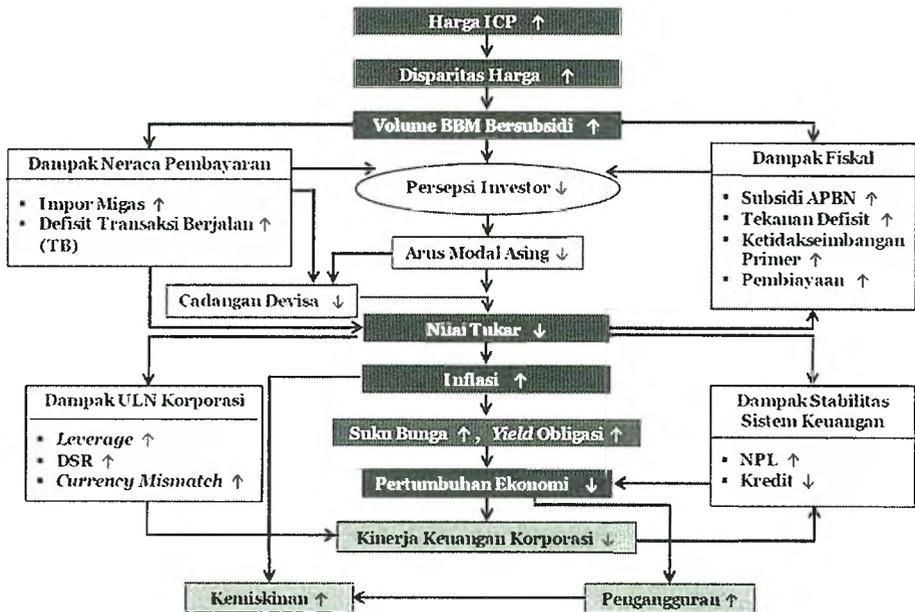
Pengurangan subsidi BBM kembali menjadi agenda penting pemerintah di tahun 2013. Beberapa alasan dikemukakan pemerintah sejak dulu. Subsidi BBM tidak produktif, tidak tepat sasaran, tidak ramah lingkungan, dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro. Subsidi BBM tidak produktif karena subsidi BBM sebesar 211.9 triliun (63% dari total subsidi) tersebut akan memberi manfaat lebih besar jika dialokasikan ke sektor produktif, seperti pertanian dan infrastruktur.

Perlu diketahui subsidi pangan, pupuk benih dan kredit program hanya 39,9 triliun rupiah atau hanya 11,5% dari subsidi sementara anggaran infrastruktur hanya 2-3% dari PDB padahal perlu ditingkatkan hingga 5% dari PDB. Subsidi BBM juga tidak tepat sasaran karena hampir setengahnya dinikmati oleh 10 persen masyarakat terkaya dan hanya 2 persen dikonsumsi 10 persen masyarakat termiskin.

Konsumsi BBM yang berlebihan karena harganya yang murah juga ikut menyumbang pada kerusakan lingkungan. Patut diingat emisi per kapita karbon dioksida berbasis bensin Indonesia termasuk tertinggi di dunia melebihi India dan China. Tentu saja dengan harga BBM di Indonesia yang termasuk murah di dunia, sangat kecil insentif bagi dunia usaha untuk beralih ke energi yang terbarukan

Terakhir, subsidi BBM yang besar dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro. Harga BBM yang terlalu murah telah meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi secara pesat. Kenaikan konsumsi BBM bersubsidi ini pada gilirannya menimbulkan dampak defisit ganda.

DEFISIT GANDA DAN DAMPAKNYA TERHADAP STABILITAS PEREKONOMIAN



Sumber: Nota Keuangan dan RAPBNP 2013.

Di satu sisi, karena produksi minyak dalam negeri terus turun, maka kekurangannya harus ditutup dengan impor BBM yang semakin besar sehingga menimbulkan defisit dalam neraca pembayaran. Di sisi lain, besarnya konsumsi BBM menyebabkan membengkaknya subsidi BBM dalam APBN sehingga terjadi defisit fiskal.

Memburuknya neraca pembayaran dan kesehatan fiskal akan mempengaruhi persepsi investor sehingga arus modal asing masuk turun. Pada saat yang sama, membengkaknya impor yang tidak diimbangi dengan naiknya ekspor akan menggerus cadangan devisa dan pada gilirannya akan memperlemah Rupiah. Perlemahan rupiah ini kemudian akan menimbulkan empat dampak utama. *Pertama*, akan memperberat pembayaran utang luar negeri perusahaan swasta yang akhirnya akan memperburuk kinerja keuangan korporasi. *Kedua*, akan mendorong *imported inflation* karena proporsi cukup besar konsumsi domestik dipenuhi melalui impor. *Ketiga*, dia akan lebih memperburuk defisit fiskal karena semakin lemah rupiah, semakin besar pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM. *Keempat*, perlemahan rupiah akan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja sektor finansial. Akumulasi semua dampak tersebut akan berujung pada perlemahan pertumbuhan ekonomi, memburuknya penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Dalam jangka pendek, tentu saja pengurangan subsidi BBM ini akan menimbulkan dampak inflasi yang cukup tinggi. Dalam RAPBN-P pemerintah mengasumsikan inflasi untuk tahun ini sebesar 7,2% sementara perkiraan Bank Indonesia 8,7%. Inflasi ini tentu saja akan menggerus daya beli kelompok termiskin. Jumlah penduduk yang sedikit di atas garis kemiskinan (*near poor*) cukup besar, sehingga inflasi akibat kenaikan harga BBM bisa membengkakkan jumlah penduduk miskin secara cukup signifikan.

Untuk mengantisipasi pemerintah akan mengucurkan *direct cash transfer* kepada sekitar 15 juta rumah tangga miskin. Jika rata-rata rumah tangga miskin beranggotakan 4 orang maka jumlah penduduk yang mendapat BLSM sekitar 60 juta orang. Bantuan langsung tersebut besarnya Rp 150.000,- dan akan diberikan selama 4 bulan.

Untuk tahun 2013, pemerintah tidak memerlukan persetujuan DPR untuk mengurangi subsidi BBM, namun diperlukan persetujuan DPR untuk mengucurkan BLSM. Kebijakan pemerintah mendapat dukungan 5 fraksi PD, Golkar, PAN, PPP dan PKB, sementara 4 fraksi lainnya, yaitu PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura menolak. Akhirnya setelah melalui perdebatan yang cukup alot, dilakukan voting yang dimenangkan fraksi-fraksi pendukung pengurangan subsidi BBM.